

MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN ADMINISTRASI BUMDES BANWA BHARU DESA BEBETIN KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG

Gede Arnawa¹, Gede Suardana¹, I Made Madiarsa¹, I Dewa Nyoman Arta Jiwa¹, Ni Ketut Adi Mekarsari¹, Luh Arthaningsih¹, I Nyoman Suandana¹, Ketut Gunawan¹, Ni Putu Sri Wati¹, I Gede Made Metera¹

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Panji Sakti
Jl. Bisma No 22 Singaraja 81116, Bali, Indonesia
e-mail : arnawakotaku@gmail.com, fe-unipas@ac.id

ABSTRAK

Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah Kabupaten, memiliki otonomi asli. Walaupun dalam batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan) dan sumber daya sosial. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Beberapa permasalahan yang dialami oleh BUMDes Banwa Bharu adalah manajemen pengelolaan dan administrasi BUMDes. Solusi yang diberikan yaitu : 1) pelatihan dan pendampingan manajemen pengelolaan BUMDes, 2) pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan. Pembinaan dan pelatihan dipandang perlu untuk dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kemampuan SDM dalam bidang sistem pelaporan keuangan.

Kata Kunci : *BUMDes, sistem pelaporan keuangan*

¹ Program Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Panji Sakti

1. PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan perekonomian desa, masyarakat dan pemerintah desa mendirikan dan menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), BUMDes didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. BUMDes tentunya berbeda dengan lembaga ekonomi lain pada umumnya karena merupakan salah satu lembaga ekonomi pedesaan. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, untuk menghindari pembentukan sistem bisnis kapitalis di pedesaan yang dapat membahayakan nilai-nilai masyarakat.

Bentuk pengelolaan ekonomi produktif desa yang kooperatif, partisipatif, emansipatoris, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan adalah merupakan perwujudan dari pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sehingga diperlukan upaya serius untuk memastikan bahwa manajemen entitas bisnis ini berfungsi secara independen, profesional dan efektif.

Pasal 87 UU RI No 23 Tahun 2017 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa BUMDesa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan

untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan mandat UUD1945, atau kesejahteraan masyarakat yang sejati, diyakini harus dibangun mulai dari tataran desa. Mubyarto. (2000); menyatakan BUMDesa memberikan ruang pengambilan peran negara melalui Pemerintah Desa untuk mengelol sumber daya alam yang dimiliki desa dan bidang produksi yang penting bagi desa dan yang menguasai hajat hidup warga desa, serta menurut (Risadi & Ahmad; 2012) mencerminkan wajah desa untuk peningkatan SDM, Ekonomi, Sosial, politik dan lingkungan sekitarnya. BUMDes, seperti halnya jenis usaha lainnya, tidak bisa serta merta menjadi perusahaan yang omsetnya banyak. Untuk menciptakan usaha yang kuat bagi BUMDes, beberapa langkah perlu dilakukan. Hal ini harus dilakukan untuk mencegah BUMDes mangkrak atau stasioner.

Adapun tahapan dimaksud adalah:

- a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. Pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting).
- d. Analisis kelayakan usaha BUM Desa
Usaha persewaan (leasing) meliputi aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, politik, bisnis dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha. Ini diarahkan pada bisnis perantara (brokerage), usaha patungan (holding), bisnis sosial (social business), bisnis keuangan (financial business), dan perdagangan (trade).
- e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis
Contohnya adalah dengan membentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. Diversifikasi Usaha
Merupakan tahap selanjutnya dimana BUMDes mencoba untuk melebarkan usahanya pada berbagai sektor, seperti BUMDes dapat berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Dalam menjalankan usaha ekonomi, BUMDesa sebagai lembaga desa harus berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas serta pengelolaan yang prudensial. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan secara matang kelayakan jenis usaha yang akan dijalankan sebelum dijalankan. Perlu dimungkinkan untuk menjalankan bidang usaha yang direncanakan. Studi kelayakan bisnis adalah metode yang paling umum untuk menentukan apakah bisnis layak atau tidak.

Menurut Ibrahim (2009), studi kelayakan bisnis adalah kegiatan yang mengevaluasi sejauh mana suatu kegiatan bisnis menghasilkan keuntungan. Saat memutuskan apakah akan menerima atau menolak ide bisnis yang direncanakan, temuan studi kelayakan bisnis dapat sangat membantu. Menurut Suherman (2011), studi kelayakan bisnis pada dasarnya dapat dilakukan untuk tujuan memulai bisnis baru atau untuk memperluas bisnis yang sudah ada. Kemampuan usaha diperlukan pada saat BUM Desa ingin mengembangkan usaha maupun pada saat usaha baru dimulai.

Badan Usaha Milik Desa Banwa Bahru Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng berdiri pada tanggal 31 Januari 2017. Modal awal BUMDesa Banwa Bahru Desa Bebetin berasal dari penyertaan dana desa sebesar Rp. 50.000.000,- yang digunakan sebagai investasi BUMDesa dan hibah barang dari pemerintah Desa Bebetin berupa 1 Unit Komputer dan 1 unit printer serta alat kerja kantor pendukung lainnya. Kegiatan usaha yang dijalankan BUMDes Banwa Bahru Desa Bebetin terdiri dari tiga unit usaha yaitu unit simpan pinjam, unit usaha pengelolaan air minum desa dan unit usaha penggemukan sapi.

Prinsip pengelolaan usaha dan kegiatan BUMDesa Banwa Bahru Desa Bebetin yaitu : transparansi, kemandirian, akuntabel, pertanggungjawaban dan kewajaran.

1. Transparansi
Selalu melakukan koordinasi dengan penasehat dan pengawas, terutama dalam menjalin kerjasama dan arah kebijakan lainnya.
2. Kemandirian

Kemandirian yang dilakukan dengan memperhatikan 3 prinsip kerja yaitu : a) mempertinggi kompetensi, b) memperbanyak kolaborasi, c) memperkecil kompetisi.

3. Akuntabel

Selalu berkoordinasi dengan kepala desa selaku penasehat serta melaporkan kegiatan BUMDesa secara berkala.

4. Pertanggungjawaban

Pengelolaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat agar kegiatan berjalan secara maksimal. Laporan pertanggungjawaban dibuat secara berkala dan tahunan yang dimaksudkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan di BUMDesa Banwa Bahru Desa Bebetin.

5. Kewajaran

Pengelola dalam menjalankan usaha atau kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada unsur rekayasa.

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan usaha yang dijalankan BUMDes Banwa Bahru Desa Bebetin sifatnya hanya melanjutkan usaha yang sudah ada sebelumnya dengan pengalihan pengelolaan oleh BUMDes Banwa Bahru Desa Bebetin. Berbagai macam persoalan mengiringi pengelolaan usaha tersebut dimana cenderung mengesampingkan aspek-aspek kelayakan usaha pada umumnya meliputi : 1). Aspek Pasar dan Pemasaran, 2). Aspek Teknis dan Teknologi, 3). Aspek Manajemen dan SDM, 4). Aspek Keuangan, 5). Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, dan Lingkungan, 6). Aspek Hukum (Yuridis).

Keberadaan BUMDesa ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi menyimpan Potensi dan harapan bagi kehidupan masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, di sisi lain BUMDesa memiliki permasalahan yang cukup pelik. BUMDesa Banwa Bahru Desa Bebetin memang belum dikelola secara profesional, sehingga sangat berpotensi memunculkan konflik horizontal. Beberapa permasalahan yang dijumpai pada BUMDesa Banwa Bahru Desa Bebetin khususnya dalam pengelolaan unit usaha air bersih diantaranya :

- a). Aspek pasar dan pemasaran, kebutuhan air bersih di Desa Bebetin merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Keinginan untuk mendapatkan kualitas air bersih serta pelayanannya masih dirasa sangat kurang oleh masyarakat pengguna air bersih (konsumen), hal ini dapat dilihat dari banyaknya complain masyarakat terhadap pengelolaan air dimana kualitas air yang keruh sering dikeluhkan oleh konsumen terutama pada saat musim hujan, sedangkan pada saat musim kemarau ketersediaan air bersih sangat terbatas bahkan disebagian wilayah tertentu tidak mendapatkan layanan air bersih sampai berhari-hari.
- b). Aspek teknis dan teknologi, distribusi air bersih dari sumber air hingga sampai ke masing-masing konsumen disalurkan melalui jaringan pipa yang usianya sudah tua sehingga sudah rapuh dan keropos, belum dimilikinya bak penampung obat untuk pengobatan di masing-masing reservoir untuk membunuh bakteri yang ada di air, belum dimilikinya bak penyaringan utama sebelum pendistribusian air ke masing-masing reservoir.
- c). Aspek manajemen dan SDM, belum diterapkannya fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan unit air bersih termasuk Sumber Daya Manusianya, permasalahan yang masih tersisa saat ini adalah tidak dimilikinya gambar jaringan dari hulu ke hilir (proses perencanaan awal), dan retensi yang cukup tinggi terjadi dalam pengelolaan unit air bersih sebelumnya.
- d). Aspek keuangan, unit air bersih BUMDesa Banwa Bahru belum menerapkan sistem keuangan yang benar sebagaimana mestinya.

(sumber : LPJ BUMDesa Banwa Bahru Desa Bebetin Th. 2020).

Permasalahan Mitra

Tim Pengabdian kepada Masyarakat mengidentifikasi permasalahan BumDes Banwa Bahru Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dengan melakukan observasi langsung dan wawancara hingga terungkap permasalahan utama yang dihadapi mitra sebagai berikut :

- 1) Kurangnya keterampilan pengelolaan manajemen keuangan dan Administrasi BUMDes dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan

- 2) Kurangnya kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan unit usaha BUMDesa.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan yaitu metode *Focus Group Discussion* (FGD), ceramah, dan partisipatif, dan latihan. Teknik pelaksanaan kegiatan yang digunakan berupa observasi, wawancara serta dokumentasi. Sedangkan untuk pelaporan kegiatannya adalah melalui analisis data lapangan, dokumentasi dan penarikan kesimpulan yang disajikan dalam laporan kegiatan. Kegiatan PKM ini menggunakan pendekatan strategi sinergitas sesuai potensi dan masalah pemecahannya yang menyeluruh meliputi tujuan, sasaran, lingkup, koordinasi, komunikasi aktif, target dan luaran.

Bentuk pelaksanaan kegiatan PKM dilaksanakan secara pendampingan antara Fakultas; ketua tim pengusul, dan mahasiswa peserta PKM, aparat desa dan pengelola BUMDesa Banwa Bahru Desa Bebetin, dengan formulasi bentuk kegiatan berupa pembinaan/pelatihan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil yang dicapai

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat FE Unipas ini dilakukan efektif mulai tanggal 11 Pebruari 2023. Adapun tempat pelaksanaannya di Tempat Rapat Kantor BUMDes Banwa Bharu Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Waktu pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan tim PkM Fakultas Ekonomi Unipas dengan pengelola BUMDes Banwa Bharu Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.

Pelaksanaan program diawali dengan tahap persiapan, identifikasi permasalahan, pelatihan, pembinaan dan pendampingan pengelola BUMDes Banwa Bharu Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Tahap persiapan telah dilaksanakan melalui observasi dan wawancara dengan pengelola BUMDes Banwa Bharu Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 11 Pebruari 2023 dalam bentuk sosialisasi aktif Bersama pengelola BUMDes Banwa Bharu Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Dalam proses pembelajaran ini banyak muncul gagasan-gagasan yang didahului dengan menggali dan menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan dan administrasi keuangan terutama manajemen pengelolaan dan administrasi BUMDes Banwa Bharu Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.



Gambar 1. Kaprodi Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja, Membuka Acara Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bumdes Banwa Bharu Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng



Gambar 2. Penyampaian materi dari narasumber terkait dengan Manajemen Pengelolaan Administrasi Bumdes Banwa Bharu Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng



Gambar 3. Ruang diskusi dan tanya jawab dari Direktur Bumdes dan Pengawas Bumdes terkait manajemen administrasi Bumdes Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng

3.2. Luaran yang telah dicapai

Kegiatan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti telah dilaksanakan kepada pengelola BUMDes Banwa Bharu Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Transfer Iptek dalam bentuk system pengelolaan keuangan BUMDesa pada pengelola BUMDes Banwa Bharu Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan menjawab permasalahan inti yang dihadapi, dimana 1) Terjadi peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan, 2) Inovasi pengelolaan keuangan dari system manual, 3) Kemampuan kelompok mitra memanfaatkan teknologi informasi melalui platform media sosial untuk memaksimalkan keuntungan dalam pengelolaan unit-unit usahanya. Keberadaan BUMDesa dalam mengelola unit usahanya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli desa sehingga berperan dalam pengembangan desa. Dibutuhkan inovasi dan

keaktivitas yang mumpuni dalam sistem pengelolaan unit-unit usaha BUMDesa tidak terkecuali sistem pengelolaan keuangan yang baik dan benar serta sesuai dengan regulasi yang ada.

Melalui potensi desa yang dimiliki seperti sumber mata air dan destinasi wisata yang ada, dapat dikelola dan dimaksimalkan sebagai upaya pengembangan desa. Pengelolaan sumber daya tersebut tidaklah mudah, dibutuhkan SDM yang mumpuni untuk memaksimalkan sumber daya yang ada tersebut. Salah satunya adalah melalui pengelolaan unit-unit usaha yang dilakukan oleh BUMDes Banwa Bharu Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.

Unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Banwa Bharu Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng yaitu berupa pengelolaan air bersih bagi masyarakat Desa Sambangan dan pengelolaan destinasi wisata. Pelayanan air bersih bagi masyarakat Desa Sambangan dan pengelolaan destinasi wisata dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana termasuk administrasi berkaitan dengan administrasi keuangan. Sistem pengelolaan keuangan BUMDesa berdasarkan system akuntansi dan regulasi pengelolaan BUMDesa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja. Adapun yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja mampu meningkatkan kemampuan pengelola BUMDes Banwa Bharu Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dalam bidang pengelolaan keuangan.
- 2) Penggunaan teknologi informasi sebagai media informasi sudah mulai digunakan dengan baik sehingga dapat membantu pengelolaan unit usaha BUMDes Banwa Bharu Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam Pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut :

- 1) Agar lebih meningkatkan lagi keterampilan pengelolaan sistem manajemen keuangan dan administrasi BUMDes kepada sumber daya manusia (SDM) yang ada dengan mengikuti pelatihan-pelatihan.
- 2) Agar lebih meningkatkan keterampilan SDM dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Ahmad, Risadi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Dapur Buku; Jakarta, 2012.
- Hastowiyono 2014. Penyusunan kelayakan usaha dan perencanaan Usaha BUMDesa. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)
- LPPM Unipas. 2019. Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Panji Sakti. Edisi I/Tahun 2019. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Panji Sakti. Singaraja.
- Mubyarto. 2000. Strategi Pembangunan Pedesaan. Bumi Aksara. Jakarta.
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

